



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Media massa yang sudah berkembang pesat membuat isu-isu baru berkembang. Salah satunya yaitu media online yang muncul sebagai media baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh suatu informasi. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bias menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen (Nurudin, 2017, p.9). Menguatnya peran media massa merupakan satu hal yang positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia (Nyarwi, 2008, p.155). Sering tidak disadari bahwa realitas yang disampaikan media massa berbeda dengan realitas yang sesungguhnya terjadi. Lewat teks berita yang disampaikan, khalayak digiring untuk memahami realitas yang telah dikonstruksikan oleh media massa ( Muslich, 2009, p.150). Media massa yang sering disebut sebagai agen budaya, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat saat ini dalam jumlah intensitas yang cukup tinggi, dimungkinkan dapat menimbulkan interaksi antara media massa dengan masyarakat (Haryati, 2012, p.42).

Masyarakat masa kini bisa disebut juga sebagai masyarakat informasi. Masyarakat akan menganggap bahwa informasi media sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Pengaruh suatu berita atau artikel dalam media, bukan hanya bergantung pada isinya, melainkan pada siapa penulisnya, tata letak (*lay out*), dan sebagainya. Pesan yang sama dapat menimbulkan pengaruh yang berbeda bila disampaikan kepada orang yang berbeda pula (Mulyana, 2011, p. 110). Arus bebas informasi sebagai konsekuensi dari globalisasi menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

Peran internet menjadi sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak, ruang dan waktu. Selain itu, perkembangan teknologi telah menimbulkan dampak pada perkembangan sosial, budaya dan ekonomi (Hikmawati, 2009, p.227).

Hal tersebut, juga berlaku bagi kelompok-kelompok rentan di Indonesia, seperti ahmadyah, LGBT, difabel dan kemiskinan. Akses mereka terhadap konten dalam media juga sangat dibatasi. Mereka tidak dapat menyuarakan aspirasi mereka di dalamnya karena media kini sangat berkaitan erat dengan sistem ekonomi politik. Melalui representasi media, ada seperangkat kriteria yang menentukan menonjol atau tidaknya sebuah acara di kanal media. Beberapa kanal memiliki kriteria tersendiri, tetapi secara garis besar sebuah acara harus memiliki sejumlah aspek agar terlihat “menarik”. Konten yang bersifat dramatis sekaligus menyajikan informasi atau edukasi disertai dengan fakta-fakta atau angka-angka yang unik untuk menarik perhatian (Nugroho, Y., Nugraha, LK, dkk, 2012, p.2).

Hal lain yang tidak memenuhi kriteria ini justru jarang sekali dimunculkan, seperti kelompok rentan atau minoritas di Indonesia. Kepentingan mereka dianggap tidak menarik dibanding isu-isu dramatis. Setiap media massa memiliki karakteristik tersendiri. Pada hakikatnya visi misi media massa pasti diarahkan pada nilai-nilai humanis yang universal, namun sering kali ada kepentingan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang menyangkut kepentingan “menyelamatkan” atau menaikkan popularitas media (Tamburaka, 2012, p.93).

Pendekatan yang diambil dalam penyusunan kriteria dalam konten media di Indonesia sekarang lebih terarah pada sensasionalisme dibandingkan dengan nilai berita itu sendiri. Oleh karena itu, tidak heran jika kelompok-kelompok rentan ini menghadapi kesulitan dalam penggambaran diri mereka di media, gagasan mengenai kebebasan

berekspresi kerap kali tidak dapat diterapkan kepada kelompok marjinal ini. Mereka dianggap sebagai penyebab terjadinya akumulasi segala bentuk penyakit di masyarakat, seperti menurunnya kualitas kehidupan atau kualitas sumber daya manusia di Indonesia (Nugroho, Y., Nugraha, LK, dkk, 2012, p.2).

Salah satu *traffic web* yang merupakan anak perusahaan dari Amazon.com berbasis di California, *Alexa Internet, Inc*, menjelaskan beberapa media terpopuler di Indonesia pada setiap harinya. Dalam hal media *online* pemberitaan, *Tribunnews.com*, *Detik.com*, *Kompas.com*, *Liputan6.com*, *Sindonews.com* memasuki peringkat ke 10 media *online* yang paling populer di Indonesia. *Kompas.com* menduduk peringkat ke-6 dengan waktu 4 menit 32 detik per harinya setiap orangnya,

*Kompas.com* sendiri dipilih karena selain berada di daftar 10 portal berita dalam jaringan yang paling sering diakses menurut *Alexa*, *Kompas.com* memiliki ideologi humanisme (Afifah, 2014, p.87). Dalam studi yang dilakukan oleh Afifah (2014) *Kompas.com* cenderung mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam membuat berita. Peneliti ingin menganalisis penerapan dalam pembuatan berita kaum marjinal di Indonesia khususnya difabel pada media yang berideologi humanisme.

Gambar 1.1 : Media Populer di Indonesia menurut *Alexa.com*

Rank	Site	Daily Time on Site	Daily Pageviews per Visitor	% of Traffic from Search	Total Sites Linking In
1	Okezone.com	5:29	4.34	12.80%	17,364
2	Google.com	12:11	14.91	0.50%	2,220,169
3	Tribunnews.com	3:37	1.92	64.20%	33,936
4	Youtube.com	11:16	6.48	17.00%	1,712,838
5	Detik.com	8:28	5.02	24.90%	49,867
6	Kompas.com	4:32	2.26	41.80%	44,451
7	Liputan6.com	4:54	2.26	54.70%	22,937
8	Grid.id	4:37	2.16	51.60%	5,898
9	Sindonews.com	3:31	2.46	47.20%	5,168
10	Tokopedia.com	12:27	7.09	25.00%	56,776
11	Blogspot.com	3:31	2.65	43.20%	13,195
12	Google.co.id	5:13	5.69	17.00%	29,162

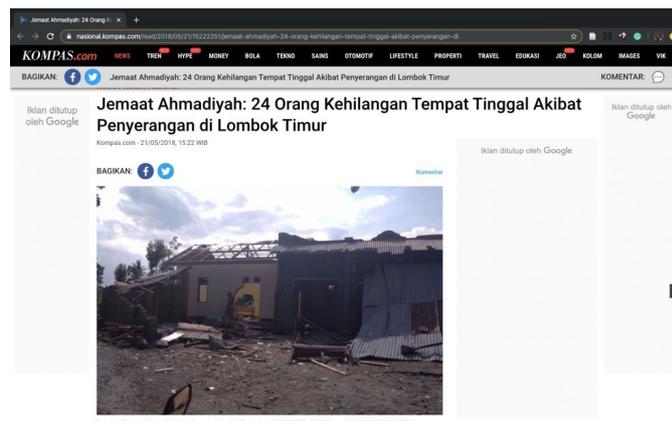
Sumber : alexa.com

Pemberitaan terhadap kaum marjinal di Indonesia memang masih sangat minim, misalnya setiap tanggal 1 Mei. Momentum buruh memperingati perjuangan mereka dan mengeluarkan aspirasi yang ingin didengar, seharusnya media dapat menjadi penyambung lidah akan tetapi media cenderung menegasikan buruh dengan narasi yang pincang (Otang, 2018, para. 1). Peran media sangat sentral dalam menyampaikan informasi kepada publik. ironisnya pemberitaan terhadap buruh hanya terjadi setahun sekali yakni setiap tanggal 1 Mei. Isu buruh cenderung dinarasikan dengan sinis dan apatis. Hal tersebut membentuk persektif masyarakat bahwa citra buruh hanyalah kelas bawah (Otang, 2018. Para.6).

Tak hanya buruh yang mendapat perlakuan negatif dari masyarakat, kekerasan terhadap kelompok minoritas lainnya masih sering terjadi, salah satunya Jemaah ahmadiyah. Peristiwa yang sempat viral terjadi pada tahun 2011, sebuah komunitas ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten diserang oleh sekelompok yang diduga Muslim garis keras. Kelompok ahmadiyah memang tidak diakui sebagai bagian dari Islam oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin memaparkan bahwa ajaran ahmadiyah sudah menyimpang dar ajaran Islam yang sebenarnya, karena ahmadiyah menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad (Bonasir, 2018, para.4). Di dalam media, kisah mengenai ahmadiyah sangat didominasi oleh pemberian label “sesat”. Tampaknya topik tersebut merupakan topik-topik yang berpotensi untuk dijual. Contoh berita ahmadiyah pada tahun 2011 yang cukup viral akibat ada pembunuhan di Cikeusik yang biasa disebut sebagai “Kasus Cikeusik”. Video penyerbuan terhadap jemaah Ahmadiyah sudah tersebar di Youtube.

Pada bulan Mei 2018, terjadi kasus penyerangan terhadap kelompok jemaah ahmadiyah di Lombok Timur. Penyerangan dilakukan pada tempat tinggal jemaah ahmadiyah di Kecamatan Sekra, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Sebanyak 24 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut (Setiawan, 2018, para.5).

Gambar 1.2 : Peristiwa penyerangan jemaah ahmadiyah



Sumber : kompas.com

Kasus ahmadiyah sudah mulai diperbincangkan sejak Februari 2018. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wntim MUI) menolak tumbuhnya LGBT Indonesia. Tidak hanya itu, MUI juga menolak ajaran kelompok Ahmadiyah yang dinilai menyesatkan agama Islam (Lingga, 2018, para.1). Tak hanya Ahmadiyah, LGBT dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan UUD 1945 atau norma yang berlaku di masyarakat (Lingga, 2018, para.3).

Kaum marjinal yang cukup menjadi perdebatan sosial adalah kaum LGBT yang dianggap menyimpang dari norma. Dalam hal tersebut, media secara tidak sengaja telah melakukan diskriminasi terhadap kaum LGBT sehingga masyarakat yang membaca berita LGBT memiliki perspektif yang dapat memojokkan kaum LGBT.

Salah satu jurnalis perempuan yang merupakan bagian dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Luviana mengatakan bahwa isu LGBT memang menjadi perdebatan yang hangat bagi media. Tercatat hampir 2.338 media di Indonesia dan jumlah ini belum termasuk media komunitas. Ia menambahkan isu LGBT merupakan isu yang menarik, tetapi umumnya terdapat beberapa perspektif yang digunakan dalam memandang kasus LGBT (Poerba, 2015, para.2).

Gambar 1.3 Grafik Diskriminasi Kelompok LGBT



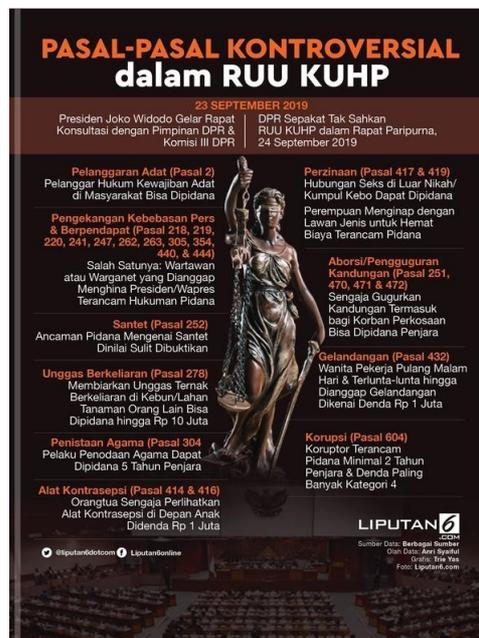
Sumber: lbhmasyarakat.org

Tercatat 15 pemberitaan yang memuat ujaran kebencian sepanjang tahun 2017. Contoh yang paling sering ditemukan pada aksi atau gerakan tolak LGBT, pesan penuh kebencian banyak digaungkan. Di tingkat nasional, LGBT memang harus dilawan. Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa LGBT merupakan penyakit masyarakat yang harus dilawan oleh semua elemen masyarakat (Fakhri, 2017, para.1). Negara menjadi aktor yang paling banyak melakukan stigma, diskriminasi, dan pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT dibandingkan kelompok masyarakat.

Hal tersebut terbukti dari beberapa kasus, seperti penangkapan terhadap 141 orang pengunjung atlantis, 12 perempuan di Bogor dan pembubaran acara Porseni di Sopeng adalah beberapa dari sekian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukumnya (Zakiah, 2018, p.31) .

Salah satu kasus yang baru-baru terjadi di Indonesia adalah pasal RKUHP yang menuai kontroversi. Mahasiswa melakukan aksi demo untuk menolak beberapa pasal yang dianggap tidak masuk akal pada Senin, 23 September lalu. Pasal yang meresahkan salah satunya yaitu pasal yang mengatur kaum marjinal seperti gelandangan dan kaum LGBT. Seperti pada pasal 432 yang mengatakan “*Wanita pekerja pulang malam hari dan terlunta-lunta hingga dianggap gelandangan akan dikenai denda satu juta rupiah*”. Tak hanya gelandangan, Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, DPR mendapatkan tekanan dari pihak asing, khususnya Eropa dalam membahas RKUHP berkenaan dengan LGBT.

Gambar 1.4 : Pasal Kontroversial RUU KUHP

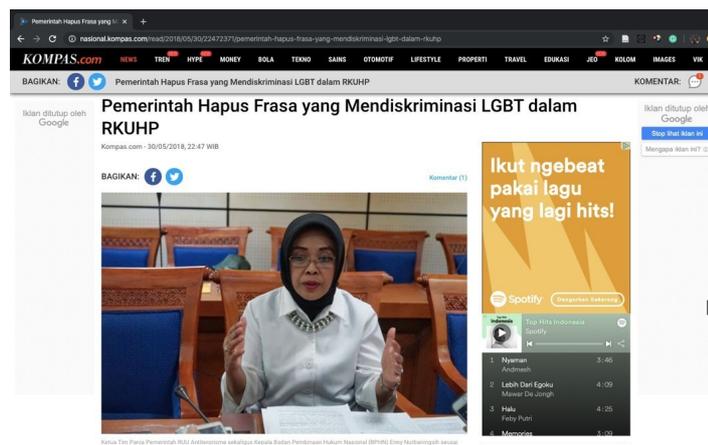


Sumber : [liputan6.com](http://liputan6.com)

Pasal tersebut berada pada pasal 421 ayat 1 yang berbunyi “ *Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III*” (Puspita, 2019, para.7).

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sekaligus Ketua Tim Panja Pemerintah, Enny Nurbaningsih mengatakan penghapusan frasa tersebut bertujuan agar undang-undang hukum pidana tidak berkesan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu (Erdianto, 2018, para.3)

Gambar 1.5 : Berita penghapusan frasa terhadap kaum LGBT dalam RKUHP



Sumber : *kompas.com*

Pemerintah seharusnya dapat merangkul kaum marginal di Indonesia untuk memperbaiki sumber daya manusia. Fenomena tersebut membuat media semakin berlomba-lomba dalam membuat suatu berita. Hal ini menegaskan bahwa media massa “berkuasa” menentukan makna realitas tertentu dalam konstruksi peristiwa yang diberitakan (Wazis, 2018, p.2).

Pada tahun 2018, kasus LGBT tergolong cukup banyak. Penerbitan peraturan daerah mengenai LGBT sudah mulai menjadi bahan perdebatan. Salah satu contoh yaitu di Kota Bogor sejumlah massa dari organisasi masyarakat melakukan aksi unjuk rasa demi menolak komunitas LGBT. Massa meminta pemerintah mengeluarkan semacam, SK atau Perda Anti LGBT yang dapat menjadikan payung hukum karena maraknya LGBT di kota Bogor (Bempah, 2018, para. 7).

Gambar 1.6 : Massa lakukan aksi unjuk rasa terkait perda anti-LGBT



Sumber : Kompas.com

Kasus lainnya mengenai LGBT yaitu diskriminasi CPNS 2019 yang menolak wanita hamil dan LGBT. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo setuju terhadap larangan kaum LGBT mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Agung (Nugraheny, 2019, para.1). Hal tersebut menjadi pro dan kontra di dalam pemerintahan, anggota komisi III DPR, Arsul Sani menegaskan bahwa larangan LGBT menjadi calon pegawai negeri sipil pada Kejaksaan Agung adalah diskriminatif.

"Hanya karena statusnya (orientasi seks), menurut saya, itu enggak boleh didiskriminasi. Apalagi itu jabatan di Kejaksaan Agung," ujar Arsul ketika dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Gambar 1.7: Penolakan LGBT menjadi CPNS



Sumber : Kompas.com

Kaum difabel masih cukup hangat diperbincangkan, khususnya pada Asian Games 2018. Ketua Federasi Penyandang Cacat untuk Indonesia, Mahmud Fasa, kecewa atas pelayanan volunter Asian Para Games 2018, Ia menilai para volunter masih belum hafal letak arena-arena pertandingan dan pintu-pintu masuk di arena GBK. Kondisi tersebut mempersulit pengunjung disabilitas yang ingin menuju ke arena pertandingan (Velarosdela, 2018, para. 1-2)

Gambar 1.8 : Penyandang disabilitas yang Kecewa pada Asian Games 2018



Sumber : Kompas.com

Tes CPNS mulai dilakukan pada tahun 2019. Badan Kepegawaian Negara mencatat ada 1.692 difabel yang melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Safitri, 2019, para.1). Salah satu kasus yang cukup viral dialami oleh dokter gigi, Romi Syofpa Ismael yang bertugas di Puskesmas Talunan, Sumatera Barat yang dinyatakan lulus CPNS, tetapi dibatalkan secara sepihak oleh Bupati Solok Selatan karena ada peserta yang melaporkan bahwa dokter Romi mengalami disabilitas.

Gambar 1.9 : Dokter Romi yang dicoret CPNS karena Difabel



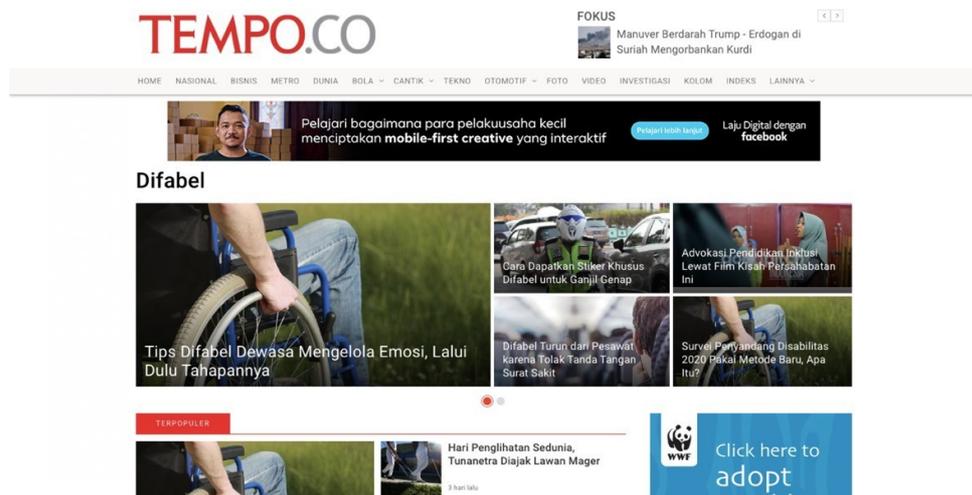
Sumber : kompas.com

Pada tahun 2018, salah satu media yang sedang mencoba untuk mendobrak pandangan masyarakat mengenai kaum marjinal adalah *Tempo.co*. Pada tahun ini, *Tempo.co* memberikan rubrik khusus difabel. *Tempo.co* berusaha mengubah permasalahan disabilitas yang erat kaitannya dengan stigma atau diskriminasi dengan menampilkan wajah baru disabilitas di media. Hal itu dilakukan dengan membahas isu disabilitas lewat topik yang beragam seperti aktivisme, tips bagaimana bersosialisasi dengan difabel, alat bantu, gaya hidup dan lainnya. Biasanya, berita

disabilitas sangat jarang dibingkai dalam bentuk berita yang inspirasional.

Usaha Tempo.co dalam pemberitaan disabilitas sebagai kaum marjinal di Indonesia sangatlah baik untuk mengurangi “konstruksi” yang selama ini menggambarkan difabel sebagai objek kasihan dan kehebatan. Tempo.co memiliki kesadaran menggunakan paradigma yang sejalan dengan tujuan para kalangan aktivis difabel di Indonesia (Thohari, 2019, para.9). Hal tersebut bukanlah hal yang mudah bagi wartawan untuk mengonstruksi berita mengenai difabel yang sudah hegemonik.

Gambar 1.10 : Rubrik khusus difabel pada Tempo.co



Sumber : <https://difabel.tempo.co/>

Dari perspektif kebijakan, media tidak menunjukkan secara jelas hak warga akan informasi. Sebagian besar kebijakan memfokuskan diri pada pengaturan industri dan bukan pada peran industri media di masyarakat atau bisa disebut dengan kebutuhan publik. Media memiliki fungsi sosial dan fungsi publik dalam memberadatkan masyarakat. Dalam kebijakan- kebijakan media (UU Penyiaran no, 32/2002) di Indonesia, media memiliki peran penting dalam pembentukan masyarakat, baik dalam sektor sosial, kebudayaan, ekonomi maupun politik. Jika dilihat dari konten media selama ini, kinerja media sangat tergantung pada kepentingan ekonomi atau politik dari

kelompok tertentu.

Kondisi ini menjadikan media sebagai alat untuk “merekayasa kesadaran” (Nugroho, Y., Nugraha, LK, dkk, p.14).

Kebijakan- kebijakan media dan upaya penegakannya telah memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan memastikan bahwa media sebagai ranah publik menjadi inti orientasi kebijakan pada media tersebut dalam menyuarakan kepentingan publik dalam peningkatan ikatan sosial dalam bermasyarakat.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan dan pemerintah baru memberikan wadah terhadap kaum marjinal (*Negara Wajib Berikan Wadah Bagi Kaum Marjinal*, 2019, para.1).

Rutinitas media mempunyai dampak yang besar terhadap isi media karena rutinitas adalah realitas sesungguhnya dari pekerja media dan tidak dapat dipisahkan dengan pekerja media dalam melakukan pekerjaan mereka. Karena sifat dan faktanya bahwa pekerja media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengonstruksikan berbagai realitas yang akan disiarkan. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita yang bermakna (Hamad, 2004, p.11).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana media mengonstruksikan kaum marginal melalui pemberitaan?

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses internalisasi media Kompas.com dalam pembuatan berita kaum marjinal khususnya difabel?
2. Bagaimana pekerja media mengeksternalisikan persepsi mengenai kaum marjinal dalam suatu pemberitaan?
3. Bagaimana pandangan objektif wartawan Kompas.com terhadap kaum marjinal melalui peliputan yang telah dilakukan?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimana internalisasi para wartawan dalam pembuatan berita difabel
2. Mengetahui bagaimana proses pengungkapan ekspresi wartawan terhadap kaum difabel
3. Mengetahui proses objektivasi yang terjadi dalam pembuatan berita kaum marjinal pada wartawan *Kompas.com*

### 1.5 Kegunaan Penelitian

#### 1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan khususnya di bidang Jurnalistik mengenai konstruksi realitas sosial media massa dalam memberitakan kaum marjinal di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana media mengonstruksinya sebagai suatu realitas yang sesungguhnya sesuai dengan kebutuhan public serta bagaimana media mampu membuat isu tertentu menjadi isu yang dianggap penting oleh masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penelitian baru mengenai konstruksi realitas sosial khususnya dalam memberitakan kaum marjinal ataupun kelompok rentan di Indonesia yang masih sangat minim perhatian masyarakat karena minimnya pemberitaan dari media massa.

### 1.5.2 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan mempertajam daya kritis dan nalar masyarakat media atau khalayak khususnya mengenai pemberitaan kaum marjinal di Indonesia terhadap konstruksi berbagai berita yang diterapkan oleh media sehingga ikut menjadi bagian dari pengontrol pers di masa yang akan datang.

### 1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam unit analisis. Pemberitaan di media yang menulis kaum marjinal khususnya di Indonesia masih cukup sedikit. Selain itu, dalam proses perancangan, peneliti sulit menemukan data-data mengenai penelitian sebelumnya maupun buku pendukung mengenai media terhadap kaum marjinal khususnya di Indonesia.